

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

<i>Dasar Hukum</i>	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 571 yang meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan
<i>Entitas dan</i>	
<i>Rencana</i>	
<i>Strategis</i>	

dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Belawan berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2023 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2023 tanggal 22 Januari 2023, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025, anggaran Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2025 yang diblokir sebesar Rp. 10.172.969.000,-dari Total anggaran sebesar Rp. 31.682.833.000,-maka anggaran Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan pada Tahun 2025 mengalami efisiensi.

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	15,500,000	211,000,628
Jumlah Pendapatan	15,500,000	211,000,628
Belanja Pegawai	11,331,630,000	12,089,931,000
Belanja Barang	19,810,853,000,	16,891,078,000
Belanja Modal	540,350,000,	15,139,000
Jumlah Belanja	31,682,833,000	28,996,148,000

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan (440831) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 16 (Enam belas) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Revisi Perubahan Kode Blokir (Kod	22/02/2025	Revisi Kewenangan
2	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	03/03/2025	Revisi Kewenangan
3	Revisi Pengembalian RO	25/03/2025	Revisi Kewenangan
4	Revisi Pembukaan Blokir Kode A	14/04/2025	Revisi Kewenangan
5	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	15/05/2025	Revisi Kewenangan
6	Revisi Buka Blokir Kode 02 (PNBP)	23/05/2025	Revisi
7	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	08/07/2025	Revisi Kewenangan
8	Revisi RPD Hal III DIPA	16/07/2025	Revisi Kewenangan
9	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	19/08/2025	Revisi Kewenangan
10	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	01/10/2025	Revisi Kewenangan
11	Revisi RPD Hal III DIPA	13/10/2025	Revisi Kewenangan
12	REVISI Penambahan anggaran Aku	17/11/2025	REVISI Kewenangan
13	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	12/12/2025	Revisi Kewenangan
14	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	15/12/2025	Revisi Kewenangan
15	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	25/12/2025	Revisi Kewenangan
16	Revisi Optimalisasi Anggaran (Pem	27/12/2025	Revisi Kewenangan

Realisasi
Pendapatan
Rp 15,500,000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Stasiun PSDKP Belawan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15,500,000 dan Rp 211,000,628.

Pendapatan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember2025

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	15,500,000	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	15,500,000	-

Pendapatan sebesar Rp 15.000.000 berasal dari pendapatan penjualan Peralatan dan Mesin kode akun 425122 yaitu: Speed Boat Dolpin dengan risalah Lelang Nomor 151/02.03/2015-01 tanggal 18 September 2025.

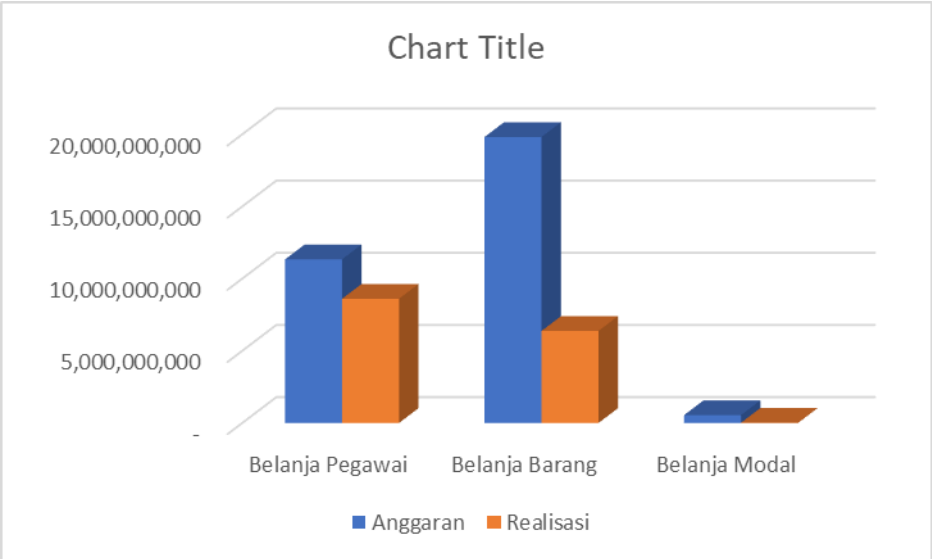
B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp 26,436,279,218

Realisasi Belanja instansi Stasiun Psdkp Belawan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26,436,279,218 atau 91.17% dari anggaran belanja sebesar Rp 28,996,148,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TH 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 2025

Uraian	TH 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12,089,931,000	12,085,106,969	99,96
Belanja Barang	16,891,078,000	14,336,034,449	84,87
Belanja Modal	15,139,000	15,137,800	99,99
Jumlah	28,996,148,000	26,436,279,218	91,17



Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 32,44% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember2024. Hal ini disebabkan karena adanya effisiensi Anggran dan Pemblokiran beberapa akun belanja barang dan akun belanja modal oleh anggaran pada TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12,085,106,969	11,577,823,515	Rp 4,38
Belanja Barang	14,336,034,449	22,779,458,110	Rp (37,07)
Belanja Modal	15,137,800	4,773,484,509	Rp (99,68)
Jumlah	26,436,279,218	39,130,766,134	Rp (32,44)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Stasiun PSDKP Belawan terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional II dan III dari

VIII Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas Nasional II Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang Stasiun PSDKP Belawan dengan pagu Prioritas Nasional II mencapai Rp13,861,257,000 dan realisasi sd 31 Desember 2025 sebesar Rp 11,010,010,904 atau 83,57 persen dari pagu anggaran dengan Target Capaian Out Put sebesar 103 satuan, dengan realisasi target 103 satuan atau 100 Persen dari Target, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)		
			Pagu	Realisasi*	%
2350	QHD001	si Kapal Per	11,486,639,000	9,335,459,263	81,27
2350	QHD003	peedboat f	116,177,000	116,143,831	99,97
2350	RCG001	aya Kelaut	1,201,235,000	1,194,293,465	99,42
2352	BHD002	awasan Su	30,000,000	29,911,680	99,71
2352	QIC001	utan yang	107,104,000	107,102,687	100
2352	QIC002	anan yang	233,099,000	227,099,978	97,43
			13,174,254,000	11,010,010,904	83,57

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 12,085,106,969 dan Rp11,577,823,515. Belanja pegawai yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 dibandingkan dengan TA

2024 mengalami Kenaikan sebesar 4,38%, disebabkan bertambahnya Pegawai P3K per Tahun anggaran 2025 dan adanya kenaikan Jabatan Fungsional beberapa Pegawwai di Stasiun Psdkp Belawan.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS+PPK	4,230,158,140	4,251,524,400	-0,50
Belanja Pembulatan Gaji PNS+PPK	65,501	76,200	-14,04
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS+PPK	335,867,840	338,357,980	-0,74
Belanja Tunj. Anak PNS+PPK	101,258,586	95,004,550	6,58
Belanja Tunj. Struktural PNS	11,880,000	12,600,000	-5,71
Belanja Tunj. Fungsional PNS+PPK	178,005,000	168,030,000	5,94
Belanja Tunj. PPh PNS	15,385,406	18,009,000	-14,57
Belanja Tunj. Beras PNS+PPK	270,343,860	267,301,309	1,14
Belanja Uang Makan PNS+PPK	474,797,000	384,726,000	23,41
Belanja Tunjangan Umum PNS+PPK	123,060,000	128,740,000	-4,41
Belanja Uang Lembur+ PPK	575,124,000	341,902,000	68,21
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan	5,770,261,595	5,573,124,454	3,54
Jumlah Belanja Kotor	12,086,206,928	11,579,395,893	4,38
Pengembalian Belanja Pegawai	(1,099,959)	(1,572,378)	-30,04
Jumlah Belanja	12,085,106,969	11,577,823,515	4,38

Pengembalian belanja Pegawai Rp 1,099, 959 terdiri dari:

1. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Struktural bulan Januari, Februari dan THR 2025 an. Edy Sutanto, sebesar Rp525.000. Kode Biling: 702504172516217, Kode Akun- 511123, Kode NTPN : 897A56QTCC0HASRP, Kode NTB: 336558455031, Tanggal bayar 17-04-2025
2. Pengembalian Kelebihan Uang Makan April 2025 an Retno Adiarti, sebesar Rp140.600. Kode Biling: 702505072633279, Kode Akun- 511628, Kode NTPN : FAED42CPT7VDN9DV,

Kode NTB: 301860761458, Tanggal bayar 07-05-2025

3. Pengembalian belanja pegawai atas Tunjangan Beras dan Tunjangan Istri Nov 2025 An. Dhidit Setiawan sebesar Rp433,170. Kode Billing 702512304161777, Kode Akun-511121 sebesar Rp360.750, Kode Akun-511126 sebesar Rp72.420, Kode NTPN 529716QTCJIS90VH, kode NTB 375836172065, Tanggal Bayar 30 Desember 2025
4. Pembulatan Gaji sebesar Rp 1,189

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 14,336,034,449

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 14,336,034,449 Rp 22,779,458,110. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 37,07% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024, disebabkan oleh pemblokiran akun Belanja Barang Perjalanan Dinas untuk efisiensi Anggaran

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 30 September 2025	REALISASI 30 September 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1,926,547,360	1,889,425,948	1,96
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	220,271,690	259,818,500	-15,22
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,704,530	12,167,500	-20,24
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,240,000	95,040,000	-17,68
Belanja Barang Operasional Lainnya	329,917,200	107,690,195	206,36
Belanja Bahan	7,574,450,387	11,104,948,576	-31,79
Belanja Honor Output Kegiatan	50,400,000	71,414,000	-29,43
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	690,893,012	963,259,951	-28,28
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	134,542,928	242,464,775	-44,51
Belanja Langganan Listrik	205,003,099	184,230,223	11,28
Belanja Langganan Telepon	94,728,337	114,057,461	-16,95
Belanja Langganan Air	18,033,050	14,504,150	24,33
Belanja Sewa	90,772,343	99,928,000	-9,16
Belanja Jasa Profesi	-	13,000,000	-100,00
Belanja Jasa Lainnya	410,198,960	345,183,820	18,83
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	415,645,655	277,664,792	49,69
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,132,143,484	2,833,849,760	-60,05
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234,302,600	454,118,917	-48,41
Belanja Pemeliharaan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Biasa	658,234,068	3,151,468,233	-79,11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,850,000	165,030,000	-78,88
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	31,750,000	-100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30,900,471,	291,900,259	-89,41
Belanja Perjalanan Biasa-Luar Kota	-	60,903,050	
Jumlah Belanja Kotor	14,339,779,174	22,783,818,110	-37,06
Pengembalian Belanja	(3,744,725)	(4,360,000)	-14,11
Jumlah Belanja	14,336,034,449	22,779,458,110	-37,07

Pengembalian Belanja Sebesar Rp3,744, 725 berasal dari:

1. Pengembalian belanja barang sebesar Rp2,264,325 berasal dari, Pengembalian Kelebihan Belanja Barang Berupa Honor Jaga Sandar KP Hiu Feb 2025 Stasiun PSDKP Belawan, Kode Biling: 702503132355411, Kode Akun- 521219, Kode NTPN : D5CBF5UFSGF4UMQJ, Kode NTB: 619984026927, Tanggal bayar 13-03-2025

2. Pengembalian atas kelebihan perjalanan Dinas An. M Syamsu Rokhman sebesar Rp 1,480,400, Kode NTPN 262FE522CPJ37GHK, Kode NTB 267825354268, Kode Biling 702507102978612, Tanggal 11-07-2025

Untuk Belanja Bahan Realisasi sd 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7,574,450,387 untuk belanja BBM kapal pengawas sebesar Rp 2,874,372,389 atau 37,94 Persen dari Realisasi belanja Bahan.

Realisasi BBM kapal Pengawas per 31 Desember2025 sebagai berikut:

Pagu Berasal dari Rupiah Murni

KAPAL	JENIS PENGISIAN	RINCIAN TAGIHAN		
		TAGIHAN	Σ BBM (Ltr)	ΣNOMINAL (Rp)
HIU 16	STASIONER	tagihan 01	15,000	303,953,000
HIU 08	STASIONER	tagihan 02	6,000	116,177,000
HIU 01	STASIONER	tagihan 03	5,000	96,815,000
HIU 01	OPS	tagihan 04	7,000	133,176,000
HIU 16	OPS	tagihan 05	10,000	190,252,000
	OPS	tagihan 06	10,000	190,252,000
HIU 01	STASIONER	tagihan 07	5,000	95,126,000
HIU 08	OPS	tagihan 08	7,000	133,176,000
HIU 16	STASIONER	tagihan 10	10,000	183,497,000
HIU 01	STASIONER	tagihan 11	5,000	90,623,000
HIU 01	STASIONER	tagihan 12	6,000	108,747,000
HIU 16	OPS	tagihan 38	3,053	57,741,389
HIU 01	OPS	tagihan 13	5,000	94,563,000
HIU 16	OPS	tagihan 14	15,000	283,689,000
HIU 01	OPS	tagihan 15	5,000	92,030,000
HIU 01	OPS	tagihan 16	6,000	110,436,000
HIU 08	OPS	tagihan 17	5,000	85,430,000
HIU 16	OPS	tagihan 18	10,000	184,060,000
HIU 16	OPS	tagihan 19	12,000	205,029,000
HIU 08	OPS	tagihan 20	7,000	119,600,000
REALISASI (s.d 30 Desember 2025)			154,053	2,874,372,389
Pagu				2,874,384,000
SISA ANGGARAN BBM				11,611

Sisa BBM per 31 Desember 2025 sbb:

No	Satuan Kerja	Nama BA	Tanggal BA	Lokasi	Sisa BBM (Liter)	Harga Satuan BBM (Liter)	Nilai BBM (Rupiah)
1	Stasiun PSDKP Belawan	HIU 01	31/12/2025	Dermaga BPPP Medan	6,370	18,744	119,399,280
2		HIU 08	31/12/2025	Dermaga BPPP Medan	7,800	19,025	148,395,000
3		HIU 16	31/12/2025	Batam	13,185	17,399	229,405,815
TOTAL					27,355	25,537	497,200,095

Belanja Modal
Rp 15,137,800

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 15,137,800dan Rp 4.773,484,509. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 99.68% dibandingkan realisasi belanja modal per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Deseber 2025	REALISASI 31 Deseber 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,137,800,	660,504,450	(97,71)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	398,012,034	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan	-	228,257,100	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	2,970,589,046	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	516,121,879	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	15,137,800	4,773,484,509	(99,68)
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	15,137,800	4,773,484,509	(99,68)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan ada tidak ada pengadaan tanah pada TA 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp15,137,800

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp15,137,800 dan Rp 1,058,516,484. Pada tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar 98,57% bila dibandingkan dengan tahun 2024. Realisasi Belanja Peralatan Modal dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,137,800	660,504,450	(97,71)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	398,012,034	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	15,137,800	1,058,516,484	(98,57)
Pengembalian	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	15,137,800	1,058,516,484	(98,57)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp 15.137.800 berasal dari:

- Pembelian Water Jet dan Polis Lantai senilai Rp 13,138,800, Nomor Kwitansi 95.3.2025.0122.42, Nomor SPM 00027T, Nomor SP2D 251231303000267
- Pembelian Loker Kabinet senilai Rp 1,999,000, Nomor Kwitansi 037/Februari/2025, Nomor SPM 00027T, Nomor SP2D 251231303000267

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

Rp 0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 3.198,846,146

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	228,257,100	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	2,970,589,046	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	3,198,846,146	(100,00)
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	0	3,198,846,146	(100,00)

Belanja Modal JIJ
Rp 0

B.5.4 Belanja Modal JIJ

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember TA 2025 dan per 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 516, 121,879

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	-	516,121,879	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	-	516,121,879	(100,00)

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja
Bantuan Sosial
Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	-	-
Uang Muka	-	-
Saldo BPP	-	-
Kwitansi UP yang belum di SPM kan	-	-
Sub Total	-	-
Saldo Lainnya	-	-
Sub Total II	-	-
Jumlah	-	-

Pengembalian UP/TUP sampai dengan 31 Desember Th 2025

Kode Billing	Jenis Setoran	Jumlah	NTPN
702512304170331	Setoran Pengembalian UP/ TUP	7,816	C3A2B1GCC
702512304152807	Setoran Pengembalian UP/ TUP	257,737	EFCDA6QTC
Total		265,553	

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat empat kali Pengembalian UP/TUP dengan Total Pengembalian Rp 265,553

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang
PNBP/Piutang
Lainnya
Rp0

C4 Piutang PNB/Piutang Lainnya

Saldo Piutang PNB/Piutang Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

C5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
TPA
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp 35,212,500

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 35,212,500 dan Rp33,979,500. Terdiri dari sbb:

NO	Uraian Sewa	Nomor SPK	Uraian		
			Nilai Kontral	Kotrak Berja	Sisa kontrak
01	Pembayaran Belanja Barang berupa Sewa Gedung Kantor Wilker PSDKP Panipahan sesuai Surat Kontrak No.B.006/PSDKPSta.2-RKH/PW.330/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025	B.005/PSDKPSta.2-AHN/TU.400/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 dan BAST No.B.011/Sta.2-AHN/TU.400/II/2024 tanggal 20 Februari 2024	9,990,000	1,665,000	8,325,000
02	Pembayaran belanja barang berupa Sewa Rumah Untuk Gedung Penyimpanan BMN Stasiun PSDKP Belawan sesuai surat perjanjian sewa No. B.1645/PSDKPSta.2/KU.220/IX/2025 tanggal 22	SPK No.1646/PSDKPSta.2/KU.220/I X/2025 tanggal 22 September 2025	35,850,000	8,962,500	26,887,500
Total			45,840,000	10,627,500	35,212,500

C.9 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Uang uka
Belanja Rp0

Saldo uang muka belanja per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.11 Persediaan

Persediaan
Rp 671,693,068

Nilai Persediaan per31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 671,693,068 dan Rp 746,304,007. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	7,774,500	10,802,500
Suku Cadang	663,918,568	735,501,507
Jumlah	671,693,068	746,304,007

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp7,774,500 dan Suku Cadang Senilai Rp663,918,568. Rincinan persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Barang Konsumsi	
Alat Tulis	695,000
Penjepit Kertas	139,000
Penghapus/Korektor	50,000
Ordner Dan Map	335,000
Cutter (Alat Tulis Kantor)	21,000
Alat Perekat	165,000
Alat Tulis Kantor Lainnya	46,000
Kertas HVS	2,154,000
Berbagai Kertas	100,000
Amplop	214,500
Tinta/Toner Printer	3,380,000
Mouse	300,000
Batu Baterai	175,000
	7,774,500
Suku Cadang	
Suku Cadang Alat	
Angkutan Apung	663,918,568
Permeter	
	663,918,568
	671,693,068

Adapun rincian Mutasi Tambah dan Kurang Persediaan per 31 Desember 2025 yaitu:

Saldo Nilai Persediaan per 31 Desember 2024	746,304,007
Mutasi tambah:	
Pembelian Persediaan	368,845,528
Reklasifikasi Masuk	-
Tranfer Masuk	-
Pendapatan Persediaan	-
Mutasi kurang:	
Pemakaian (Habis Pakai)	(443,456,467)
Koreksi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	671,693,068

Mutasi Tambah Persediaan terdiri dari:

Pembelian Persediaan sebesar Rp368,845,528 terdiri dari pembelian barang konsumsi (117111) senilai Rp 134,542,928 dan Pembelian Suku Cadang (117114) senilai Rp 234,302,600

Mutasi Kurang Pemakaian:

Pemakaian (Habis Pakai) Barang Konsumsi sebesar Rp (137,570,928) dan Suku Cadang sebesar Rp (305,885,539).

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR
Rp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp1,485,395,729

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1,485,395,729 dan Rp1,485,395,729. Tidak ada Penambahan tanah pada TA 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,485,395,729
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Desember 2025	1,485,395,729

Tidak terdapat Mutasi tambah dan kurang Tanah di Stasiun Psdkp Belawan sd 31 Desember 2025.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	154 M2	Jl. Medan-Cermin,Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tj. Beringin Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara	37,006,000
2	1464 M2	Jl. Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, Riau	143,509,000
3	4684 M2	Jl. Pelabuhan Kuala Langsa Langsa Barat Kota Langsa NAD	1,304,880,729
Jumlah			1,485,395,729

C.16 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp 56,938,373,516

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp56,938,373,516 dan Rp 56,880,177,716. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	56,880,177,716
Mutasi tambah:	
Pembelian	15,137,800
Perolehan Lainnya	1,193,198,000
Transfer Masuk	11,396,000
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar	(798,536,000)
Reklasifikasi Keluar	-
Pencatatan penghapusan	(363,000,000)
Saldo per 31 Desember 2025	56,938,373,516
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2025	(37,939,191,246)
Nilai Buku per 31 Deptember 2025	18,999,182,270

a. Mutasi Tambah Pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp 15,137,800 terdiri dari:

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
Water Jet dan Polis Lantai	1	Buah	13,138,800
Loker Kabinet	1	Buah	1,999,000
Jumlah	2		15,137,800

- Pembelian Water Jet dan Polis Lantai senilai Rp 13,138,800, Nomor Kwitansi: 95.3.2025.0122.42, Nomor SPM 00027T, Nomor SP2D 251231303000267, tanggal 4 Februari 2025
 - Pembelian Loker Kabinet senilai Rp 1,999,000, Nomor Kwitansi: 037/Februari/2025, Nomor SPM 00027T, Nomor SP2D 251231303000267, Tanggal 4 Februari 2025
- b. Mutasi Tambah Perolehan Lainnya sebesar Rp1,193,198,000 yaitu: Barang Rampasan Negara, yang diterima dari Kejaksaan RI berupa 4 Unit Kapal Perikanan, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 1,193,198,000, BAST Nomor 689/SJ/PL.450/VII/2025 dari Kepala Biro Keuangan dan BMN kepada Sekretaris Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

No	Nama Barang Milik Negara	Lokasi Barang Rampasan Negara	Nilai Barang Milik Negara	Dokumen Pemilikan	Satker Pengelola
1	1(Satu) Kapal KM . SLFA 5323 GT 68.08	TPI Purnama Dumai	Rp212,750,000	Putusan PN Dumai Nomor 295/Pid.Sus/2023 PN DUM tanggal 25 Oktober 2023	Stasiun PSDKP Belawan
2	1(Satu) Kapal KM . KHF 1355 GT 60.77	Gudang Bengkel Gabion	Rp394,662,000	Putusan PN Medan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023 PN Mdn tanggal 18 Oktober	Stasiun PSDKP Belawan
3	1(Satu) Kapal KM . SALFA 3763 GT 45.41	Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	Rp304,008,000	Putusan PN Medan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023 PN Mdn tanggal 7 November 2023	Stasiun PSDKP Belawan
4	1(Satu) Kapal KM . PFKA 7541 GT 33.93	Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	Rp281,778,000	Putusan PN Medan Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2023 PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023	Stasiun PSDKP Belawan
		Total	Rp1,193,198,000		

- c. Mutasi Tambah Transfer masuk senilai Rp 11,396,000 berupa 1 (satu) buah perangkat pengolah data (LapTop) senilai Rp11.396.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), BAST Nomor : B.1183/PSDKPSta.6/PL.930/VIII/2025
- d. Pencatatan penghapusan sebesar Rp363,000,000, Speed Boaad Dolpin, NUP 8, dasar Pencatatan penghapusan:
- Surat Nomor B.2142/DJPSDKP.1/PL.750/VI/2025, Hal: Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Speedboat/ Motor Tempel pada Stasiun PSDKP

Belawan melalui KPKNL Medan, Tanggal 25 Juni 2025.

- Surat Nomor B.974/PSDKPSta.2/PL.750/VI/2025, Hal: Usulan Penghapusan Barang Milik Negara, Tanggal 16 Juni 2025
- Surat Tugas Nomor B.901/PSDKPSta.2/PL.760/VI/2025 tentang Melaksanakan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka usulan Penghapusan BMN pada Unit Eselon-I : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nama Satker: Stasiun PSDKP Belawan, Tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Inventaris Barang Milik Negara Nomor B.951/PSDKPSta.2/PL.450/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025
- Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka Penghapusan Nomor B.952/PSDKPSta.2/PL.750/VI/2025
- Telaah Penghapusan Barang Milik Negara Nomor B.953/PSDKPSta.2/PL.750/VI/2025, Tanggal 10 Juni 2025
- SK Penghapusan NOMOR 1594/KEPMEN-KP/PL.750/X/2025, Tanggal Oktober 2025

e. Hibah Keluar sebesar Rp 798,536,000 terdiri dari:

- Hibah BMN Kapal Penangkap Ikan 2 NUP senilai Rp 585,786,000 ke Pemkab. Deliserdang BAST Nomor B.2319/PSDKPsta.2/PL.750/XI/2025, sesuai dengan Perjanjian HIBAH Nomor B.2138/PSDKPSta.2/PL.7750/XI/2025 dan 000.2.4/6300, SK Penghapusan Tanggal 26-11-2025, SK Penghapusan Nomor: 1933/KepMen-KP/PL.750/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
- Hibah BMN Kapal Penangkap Ikan 1 NUP senilai Rp 212.750.000 ke Pem. Provinsi Riau BAST Nomor B.2221/PSDKPsta.2/PL.750/XIII/2025 dan Nomor: 5642/500.5.2/DKP/2025, Tanggal 10-12-2025, SK Penghapusan Nomor: 1943/KepMen-KP/PL.750/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025

C.17 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp13,831,651,967 dan Rp13,831,651,967 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13,831,651,967
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	13,831,651,967
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2025	(1,469,969,004)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	12,361,682,963

Tidak terdapat Mutasi tambah dan kurang Gedung dan Bangunan sd 31 Desember 2025.

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Jaringan dan Irigasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3,312,350,419 dan Rp3,312,350,419. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3,312,350,419
Mutasi tambah:	-
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-
Mutasi kurang:	-
Revaluasi BMN	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	3,312,350,419
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1,246,259,502)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2,066,090,917

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

Lainnya dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan
Rp0 bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan
Pengerjaan Rp0 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Mutasi tambah dan mutasi kurang atas KDP ini untuk Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	-
Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan	-
Perolehan Penambahan KDP; Penimbunan Jalan dalam	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi, Penimbunan J	-
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi, Gedung dan B	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(40,666,815,752)

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(40,666,815,752) dan Rp(38,951,554,130). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember2025 adalahsebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	18,999,182,270	39,842,074,364
2	Gedung dan Bangunan	12,361,682,963	1,613,829,014
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,066,090,917	1,286,036,890
4	Aset Tetap Lainnya	-	-
Total		33,426,956,150	42,741,940,268

C.22 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.23 Dana yang dibatasi Penggunaanya

Dana Dana yang dibatasi Penggunaanya Rp0 Dana yang dibatasi Penggunaanya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar senilai Rp0 dan Rp 1,045,749,980

C.24 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp16,862,000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	16,862,000
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Usulan Barang Rusak Berat	0
Hibah (Keluar)	0
Saldo per 30 Juni 2025	16,862,000

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan berupa 1 unit Sepeda Motor nup 36 karena hilang sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi BMN Hilang nomor B.2071/PSDKPSta.2/PL.790/IX/2023 tanggal 1 September 2023

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya (Rp0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan (Rp16,862,000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 13,976,094

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 13,976,094 dan Rp1,059,546,340. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua

belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang Kepada pihak ketiga sebesar Rp135,345,093 berasal dari Belanja barang yang masih harus dibayar yaitu:

- Pemakaian Listrik Bulan Desember 2025 dibayarkan Januari 2026 sebesar Rp 8,703,005
- Pemakaian Telepon dan Internet Bulan Desember 2025 dibayarkan Januari 2026 sebesar Rp 4,679,139
- Pemakaian Air Bulan Desember 2025 dibayarkan Januari 2026 sebesar Rp 593,950

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.29 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp 0*

C.30 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0 Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.32 Ekuitas

Ekuitas Rp 33,777,231,446 Ekuitas per 31 Desember2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 33,777,231,446 dan Rp 37,582,797,457. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp 21,283,526. Sampai dengan 31 Desember2025 tidak ada Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Stasiun Psdkp Belawan

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	% REALISASI PENDAPATAN
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp 12,085,106,969

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar 12,085,106,969 dan Rp 11,577,823,515. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS+PPK	4,230,158,140	4,251,524,400	-0,50
Beban Pembulatan Gaji PNS+PPK	65,501	76,200	-14,04
Beban Tunj. Suami/Istri PNS+PPK	335,867,840	338,357,980	-0,74
Beban Tunj. Anak PNS+PPK	101,258,586	95,004,550	6,58
Beban Tunj. Struktural PNS	11,880,000	12,600,000	-5,71
Beban Tunj. Fungsional PNS+PPK	178,005,000	168,030,000	5,94
Beban Tunj. PPh PNS	15,385,406	18,008,089	-14,56
Beban Tunj. Beras PNS+PPK	270,343,860	267,302,220	1,14
Beban Uang Makan PNS+PPK	474,797,000	384,726,000	23,41
Beban Tunjangan Umum PNS	123,060,000	128,740,000	-4,41
Beban Uang Lembur+ PPK	575,124,000	341,902,000	68,21
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan Jumlah Belanja Kotor	5,770,261,595 12,086,206,928	5,573,124,454 11,579,395,893	3,54 4,38
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji	(1,189)	(2,378)	-50,00
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(525,000)	(1,200,000)	-56,25
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(72,420)	(370,000)	-80,43
Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	(140,600)	-	#DIV/0!
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(360,750)	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Belanja Pegawai	12,085,106,969	11,577,823,515	4,38

Pengembalian Beban Pegawai Berasal dari:

1. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Struktural bulan Januari, Februari dan THR 2025 an. Edy Sutanto, sebesar Rp525.000. Kode Billing: 702504172516217, Kode Akun- 511123, Kode NTPN : 897A56QTCC0HASRP, Kode NTB: 336558455031, Tanggal bayar 17-04-2025
2. Pengembalian Kelebihan Uang Makan April 2025 an Retno Adiarti, sebesar Rp140.600. Kode Billing: 702505072633279, Kode Akun- 511628, Kode NTPN : FAED42CPT7VDN9DV, Kode NTB: 301860761458, Tanggal bayar 07-05-2025

3. Pengembalian belanja pegawai atas Tunjangan Beras dan Tunjangan Istri Nov 2025 An. Dhidit Setiawan sebesar Rp433,170. Kode Biling 702512304161777, Kode Akun-511121 sebesar Rp360.750, Kode Akun-511126 sebesar Rp72.420, Kode NTPN 529716QTCJIS90VH, kode NTB 375836172065, Tanggal Bayar 30 Desember 2025
4. Pembulatan Gaji sebesar Rp 1.189,

Tidak Terdapat Selisih antara Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2025 dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.

Uraian	Nilai
Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025	12,085,106,969
Beban belanja pegawai per 31 Desember 2025	12,085,106,969
Selisih	0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp
Rp137,570,928

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 137,570,928 dan Rp 234,504,435. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan mengalami penurunan 41,34 % pada TA 2025, dibanding dengan TA 2024

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	137,570,928	234,504,435	(41,34)
Beban Persediaan Bahan baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah	137,570,928	234,504,435	(41,34)

Uraian	Nilai
Realisasi belanja persediaan per 31 Desember	134,542,928,
Beban belanja persediaan per 31 Desember	137,570,928
Selisih	3,028,000

Terdapat selisih antara Realisasi belanja dengan beban persediaan konsumsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3,028,000

Selisih Realisasi Belanja Persediaan konsumsi dengan Beban Persediaan sebesar Rp 3,028,000 merupakan sisa Persediaan Konsumsi yang menambah Saldo Awal Persediaan Konsumsi sebesar Rp10,802,500 sehingga Saldo Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp7,774,500 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan Konsumsi	10,802,500
Pembelian	134,542,928
Pemakaian	(137,570,928)
Selisih	(3,028,000)
Saldo Persediaan Konsumsi 31 Desember	7,774,500

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp 11,695,660,377

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 11,695,660,377 dan Rp 15,272,698,938. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	1,926,547,360	1,889,425,948	1,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	220,271,690	259,818,500	(15,22)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,704,530	12,167,500	(20,24)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78,240,000	95,040,000	(17,68)
Beban Barang Operasional Lainnya	329,917,200	107,690,195	206,36
Beban Bahan	7,574,450,387	11,104,948,576	(31,79)
Beban Honor Output Kegiatan	50,400,000	71,414,000	(29,43)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	690,893,012	963,259,951	(28,28)
Beban Langganan Listrik	207,135,733	186,209,944	11,24
Beban Langganan Telepon	92,462,487	114,692,188	(19,38)
Beban Langganan Air	18,346,000	14,676,150	25,01
Beban Sewa	89,357,343	95,172,166	(6,11)
Beban Jasa Lainnya	410,198,960	345,183,820	18,83
Beban Jasa Profesi	-	13,000,000	(100,00)
Pengembalian Beban Barang	(2,264,325)		#DIV/0!
Jumlah	11,695,660,377	15,272,698,938	(23,42)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,853,674,678 dan Rp 3,613,186,041. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap

Beban Pemeliharaan
Rp 1,853,674,678

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	415,645,655	277,664,792	49,69
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,132,143,484	2,833,849,760	(60,05)
Beban Persediaan suku cadang	305,885,539	501,671,489	(39,03)
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Jumlah	1,853,674,678	3,613,186,041	(48,70)

Uraian	Nilai
Realisasi belanja Pemeliharaan per 31 Desember	1,782,091,739
Beban belanja Pemeliharaan per 31 Desember	1,853,674,678
Selisih	71,582,939

Terdapat selisih sebesar Rp 71,582,939 antara Realisasi belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan per 31 Desember 2025. Selisih Realisasi Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp71.582.939 merupakan sisa Persediaan Suku Cadang yang menambah Saldo Awal Persediaan Suku Cadang sebesar Rp 735,501,507, sehingga Saldo Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 663,918,568.

Saldo Awal Suku Cadang per 31 Desember 2024	735,501,507
Realisasi Belanja Persediaan Suku	234,302,600
Beban persediaan Suku Cadang	(305,885,539)
Selisih	(71,582,939)
Saldo Persediaan Suku Cadang 31 Desember 2025	663,918,568

Beban Perjalanan
Dinas Rp
722,504,139

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 722,504,139 dan Rp 3,696,691,542. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan
2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	658,234,068	3,151,468,233	-79,11
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,850,000	165,030,000	-78,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	30,900,471	31,750,000	-2,68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar	-	291,900,259	-100,00
Beban Perjalanan Dinas biasa-Luar Negeri		60,903,050	
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(1,480,400)	(3,360,000)	
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa-L	-	(1,000,000)	
Jumlah	722,504,139	3,697,691,542	-80,46

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 4,141,990,138

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4,141,990,138 dan Rp 6,423,758,589. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 410,162,000

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 Rp 410,162,000 dan Rp (23,480,610)TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	15,500,000	13,527,330	14,58
Pendapatan dari kegiatan non operasional lain	1,193,198,000	117,060	1019204,63
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	798,536,000	(37,125,000)	(2250,94)
Beban kegiatan non operasional lainnya	-		#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	410,162,000	(23,480,610)	(1846,81)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Surplus Kegiatan Non Operasional berasal dari:

- Pendapatan Pelepasan aset non lancar sebesar Rp 15,500,000 berasal dari Pendapatan sebesar Rp 15.000.000 berasal dari pendapatan penjualan Peralatan dan Mesin kode akun 425122 yaitu: Speed Boat Dolpin dengan risalah Lelang Nomor 151/02.03/2015-01 tanggal 18 September 2025.
- Mutasi Tambah Perolehan Lainnya sebesar Rp1,193,198,000 yaitu: Barang Rampasan Negara, yang diterima dari Kejaksaan RI berupa 4 Unit Kapal Perikanan, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 1,193,198,000, BAST Nomor 689/SJ/PL.450/VII/2025 dari Kepala Biro Keuangan dan BMN kepada Sekretaris Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

No	Nama Barang Milik Negara	Lokasi Barang Rampasan Negara	Nilai Barang Milik Negara	Dokumen Pemilikan	Satker Pengelola
1	1(Satu) Kapal KM . SLFA 5323 GT 68.08	TPI Purnama Dumai	Rp212,750,000	Putusan PN Dumai Nomor 295/Pid.Sus/2023 PN DUM tanggal 25	Stasiun PSDKP Belawan
2	1(Satu) Kapal KM . KHF 1355 GT 60.77	Gudang Bengkel Gabion	Rp394,662,000	Putusan PN Medan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2023	Stasiun PSDKP Belawan
3	1(Satu) Kapal KM . SALFA 3763 GT 45.41	Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	Rp304,008,000	Putusan PN Medan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2023 PN Mdn tanggal 7 November 2023	Stasiun PSDKP Belawan
4	1(Satu) Kapal KM . PFKA 7541 GT 33.93	Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang	Rp281,778,000	Putusan PN Medan Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2023 PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023	Stasiun PSDKP Belawan
		Total	Rp1,193,198,000		

- Hibah Keluar sebesar Rp 798,536,000 terdiri dari:
 - Hibah BMN Kapal Pengangkap Ikan 2 NUP senilai Rp 585,786,000 ke Pemkab. Deliserdang BAST Nomor B.2319/PSDKPsta.2/PL.750/XI/2025, sesuai dengan Perjanjian HIBAH Nomor B.2138/PSDKPsta.2/PL.7750/XI/2025 dan 000.2.4/6300 Tanggal 26-11-2025. SK Penghapusan Nomor: 1933/KepMen-KP/PL.750/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025
 - Hibah BMN Kapal Pengangkap Ikan 2 NUP senilai Rp 212.750.000 ke Pem. Provinsi Riau BAST Nomor B.2221/PSDKPsta.2/PL.750/XIII/2025 dan Nomor: 5642/500.5.2/DKP/2025 Tanggal 10-12-2025. SK Penghapusan Nomor: 1943/KepMen-KP/PL.750/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp
37,582,797,457

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 37,582,797,457 dan Rp 40,583,116,165

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(30,226,345,229)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(30,226,345,229)dan Rp(40,820,860,144) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset

Koreksi Atas Reklasifikasi
Persediaan/Aset Rp0

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0	Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.5 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp0	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(9,033,006) Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain	E.3.6 Koreksi Lain-Lain
Rp0	Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp880,364 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas	E.4 Transaksi Antar Entitas
Rp 26,420,779,218	Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 26,420,779,218 dan Rp 37,828,694,078. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	26,436,279,218	39,130,766,134
313121	Diterima dari Entitas Lain	(15,500,000)	(211,000,628)
313211	Transfer Keluar	-	(1,091,071,428)
313221	Transfer Masuk	-	-
JUMLAH		26,420,779,218	37,828,694,078

Diterima dari Entitas Lain Rp 0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

Transfer Masuk/Keluar Lain Rp 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung Rp 0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung tanggal 31 Desember2025 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir Rp 33,777,231,446

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 33,777,231,446 dan Rp 37,582,797,457

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Pejabat Pengelola Keuangan di Stasiun Psdkp Belawan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari;

1. Kuasa Pengguna Anggaran, ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tentang Perubahan Kelima Puluhan satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah(UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
2. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar ditetapkan melalui KEPUTUSAN Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan NOMOR: 001/PSDKPSta.2/Kep.KPA //2025 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar ditetapkan melalui KEPUTUSAN Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan
3. Bendahara Pengeluaran ditetapkan melalui KEPUTUSAN Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan NOMOR: 002/PSDKPSta.2/Kep.KPA //2025 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran melalui Keputusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : 07/PSDKPSta.2/ Kep. KPA / I / 2025 Tentang TENTANG Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Perawatan Darurat 2025

Selama TH Anggaran 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan menggunakan anggaran untuk Pemeliharaan Perawatan darurat Kapal Pengawas 08, Kapal Pengawas Napoleon 028 dan Penyediaan Tepat Tambat Labuh Darurat Kapal Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor SPM 00550T/440831/2025, Nomor SP2D 259991340044532, senilai Rp63.500.000 Pembayaran Belanja Barang Penyediaan Tempat Tambat Labuh Darurat Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Belawan sesuai BAST No. 190/PSDKPSta.2/PL.430/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 dan BAPP No.189/PSDKPSta.2/PL.430/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025
 - ☐ Tempat Labuh Kapal Pengawas berada di Pelabuhan BP3, dibuat dari kayu Nibung untuk mengkaitkan Tali Kapal dan ada Jembatan di ujung Jembatan
2. Nomor SPM 00767T/440831/2025, Nomor SP2D 259991320615135, senilai Rp.75.702.000 Pembayaran belanja barang berupa Perawatan Darurat Mesin Utama (M/E) Kapal Pengawas Hiu 08 Tahun 2025 sesuai BAPP No.348/PSDKPSta.2/PL.430/XI/2025 tanggal 3 November 2025 dan BAST No.349/PSDKPSta.2/PL.430/XI/2025 tanggal 3 November 2025
 - ☐ Perbaikan Pipa Bahan Bakar yang Rusak sebelah kiri Kapal dan Tejadi Kebocoran Injektor sebelah kiri Kapal Pengawas Hiu 8
3. Nomor SPM 00935T/440831/2025, Nomor SP2D 259991320830849 senilai Rp61.593.900 Pembayaran belanja barang berupa Pengadaan Kegiatan Perawatan Darurat Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 028 sesuai BAST No.597/PSDKPSta.2/PL.430/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 dan BAPP No.596/PSDKP Sta.2./PL.430/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025

- ☐ PerbaikanMesin Utama Sisi Kiri (Portside) –Volvo Penta D4- 270 dan Perbaikan Mesin Utama Sisi Kanan (Starboard) –VolvoPenta D4- 27

Informasi Pagu Blokir

Informasi Pagu Blokir

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	11,331,630,000	-	-	-
2	52	19,810,853,000	3,347,755,000		
3	53	540,350,000			

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp10.172.969.000,- Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp4.421.921.000, sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sampai Akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp334.755.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Informasi Sisa BBM Kapal Pengawas per 31 Desember 2025

No	Satuan Kerja	Nama BA	Tanggal BA	Lokasi	Sisa BBM (Liter)	Harga Satuan BBM (Liter)	Nilai BBM (Rupiah)
1	Stasiun PSDKP Belawan	HIU 01	31/12/2025	Dermaga BPPP Medan	6,370	18,744	119,399,28
2		HIU 08	31/12/2025	Dermaga BPPP Medan	7,800	19,025	148,395,00
3		HIU 16	31/12/2025	Batam	13,185	17,399	229,405,81
TOTAL					27,355	25,537	497,200,09

Sumber Anggaran Rupiah Murni

REALISASI BBM SOLAR (DEX LITE) KAPAL PENGAWAS
STASIUN PSDKP BELAWAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	BULAN	KAPAL	JENIS PENGISIAN	RINCIAN TAGIHAN			HARGA
				TAGIHAN	Σ BBM (Ltr)	ΣNOMINAL (Rp)	RATA-
1	JANUARI	TIDAK ADA TRANSAKSI PEMBELIAN BBM KAPAL PENGAWAS					
2							
9	Februari						
21	Maret	HIU 16	STASIONER	tagihan 01	15,000	303,953,000	20,264
34	Mei	HIU 08	STASIONER	tagihan 02	6,000	116,177,000	19,363
35		HIU 01	STASIONER	tagihan 03	5,000	96,815,000	19,363
36		HIU 01	OPS	tagihan 04	7,000	133,176,000	19,025
37		HIU 16	OPS	tagihan 05	10,000	190,252,000	19,025
38			OPS	tagihan 06	10,000	190,252,000	19,025
39		HIU 01	STASIONER	tagihan 07	5,000	95,126,000	19,025
40		HIU 08	OPS	tagihan 08	7,000	133,176,000	19,025
42		Juni	HIU 16	STASIONER	tagihan 10	10,000	183,497,000
43	HIU 01		STASIONER	tagihan 11	5,000	90,623,000	18,125
44	HIU 01		STASIONER	tagihan 12	6,000	108,747,000	18,125
45	DESEMB ER	HIU 16	OPS	tagihan 38	3,053	57,741,389	18,913
46		HIU 01	OPS	tagihan 13	5,000	94,563,000	18,913
47		HIU 16	OPS	tagihan 14	15,000	283,689,000	18,913
48		HIU 01	OPS	tagihan 15	5,000	92,030,000	18,406
49		HIU 01	OPS	tagihan 16	6,000	110,436,000	18,406
50		HIU 08	OPS	tagihan 17	5,000	85,430,000	17,086
51		HIU 16	OPS	tagihan 18	10,000	184,060,000	18,406
52		HIU 16	OPS	tagihan 19	12,000	205,029,000	17,086
53		HIU 08	OPS	tagihan 20	7,000	119,600,000	17,086
REALISASI (s.d 30 Desember 2025)					154,053	2,874,372,389	18,658
PAGU ANGGARAN AWAL						2,874,384,000	
SISA ANGGARAN BBM						11,611	-

Sumber Anggaran PNPB

REALISASI BBM SOLAR (DEX LITE) KAPAL PI
STASIUN PSDKP BELA
TAHUN ANGGARAN 2

NO	BULAN	KAPAL	JENIS PENGISIA N	RINCIAN TAGIHAN		
				TAGIHAN	Σ BBM (Ltr)	ΣNOMINAL (Rp)
7	Februari	TRANSAKSI PEMBELIAN BBM KAPAL PENGAWAS LINGKUP S				
8						
9						
21	Maret					
1	Juli	HIU 08	STA	TAGIHAN 1	3,000	55,387,000
2		HIU 08	STA	TAGIHAN 2	4,000	73,849,000
3		HIU 08	OPS	TAGIHAN 3	5,000	91,467,000
4		HIU 16	OPS	TAGIHAN 4	10,000	169,813,000
5		HIU 01	OPS	TAGIHAN 5	7,000	128,054,000
6		HIU 16	OPS	TAGIHAN 6	6,000	109,761,000
7	AGUSTUS	HIU 16	OPS	TAGIHAN 7	5,000	86,996,000
8		HIU 16	OPS	TAGIHAN 8	5,000	86,996,000
9	SEPTEMBER	HIU 16	OPS	TAGIHAN 9	6,000	86,213,000
10		HIU 16	OPS	TAGIHAN 10	1,000	17,243,000
11		HIU 01	OPS	TAGIHAN 11	5,000	93,719,000
12		HIU 01	OPS	TAGIHAN 12	2,000	37,487,000
13		HIU 01	OPS	TAGIHAN 13	5,000	93,719,000
14		HIU 01	OPS	TAGIHAN 14	5,000	93,719,000
15	OKTOBER	HIU 16	OPS	TAGIHAN 15	12,000	209,418,000
16		HIU 16	OPS	TAGIHAN 16	10,000	175,038,000
17		HIU 01	OPS	TAGIHAN 17	5,000	94,282,000
18		HIU 01	OPS	TAGIHAN 18	3,000	56,569,000
19		HIU 01	OPS	TAGIHAN 19	6,000	113,138,000
20		HIU 01	OPS	TAGIHAN 20	5,000	87,519,000
21		HIU 16	OPS	TAGIHAN 21	12,000	210,045,000
22		HU 08	OPS	TAGIHAN 22	3,000	56,569,000
23		HIU 16	OPS	TAGIHAN 23	6,000	105,023,000
24		HIU 08	OPS	TAGIHAN 24	7,000	130,418,000
25	NOVEMBER	HIU 08	OPS	TAGIHAN 25	5,000	86,474,000
26		HIU 08	OPS	TAGIHAN 26	1,000	17,295,000
27		HIU 16	OPS	TAGIHAN 27	5,000	86,474,000
28		HIU 08	OPS	TAGIHAN 28	5,000	94,844,000
29		HIU 08	OPS	TAGIHAN 29	1,000	18,969,000
30		HIU 16	OPS	TAGIHAN 30	11,000	193,691,000
31		HIU 08	OPS	TAGIHAN 31	5,000	94,844,000
32		HIU 08	OPS	TAGIHAN 32	1,000	18,969,000
33	DESEMBER	HIU 08	OPS	TAGIHAN 33	7,000	132,388,000
34		HIU 01	OPS	TAGIHAN 34	3,000	52,668,000
35		HIU 08	OPS	TAGIHAN 35	7,000	122,892,000
36		HIU 01	OPS	TAGIHAN 36	5,000	94,563,000
37		HIU 16	OPS	TAGIHAN 37	5,000	94,563,000
38		HIU 16	OPS	TAGIHAN 38	1,373	25,967,549
REALISASI (s.d 30 Desember 2025)					189,000	3,597,043,549
PAGU ANGGARAN AWAL						3,597,046,000
SISA ANGGARAN BBM						2,451,002,451

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA
KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PER 31 DESEMBER 2025

Kode BA dan Nama Satker: (440831) STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		✓
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal Pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
	a. Pagu/DIPA		✓
	b. Estimasi PNB		✓
	c. Belanja		✓
	d. Pengembangan Belanja		✓
	e. Pendapatan		✓
	f. Pengembangan Belanja		✓
	g. Kas BLU		✓
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓
	i. Kas Hibah		✓
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓
	Rekon Internal	Ya	Tidak
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah) Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya (218111) Sampai Dengan Periode	✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓

2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211. Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	NA		NA
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	NA		NA
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak

	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	NA	NA	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?l?	NA	NA	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	√		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	√		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya. Jelaskan dalam Caik			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset". Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
	TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
			√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
		√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak

- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
8 Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	✓		Ya/Tidak
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	✓		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
2 Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2 Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
3 Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak
4 Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak
5 Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2 Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3 Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4 Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5 Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6 Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1 Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2 Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3 Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4 Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5 Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6 Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7 Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan

Mengetes

Pejabat Pengguna Anggaran



Mujtaba Umar Nasution

Belawan, 31 Desember 2025

Penelaah

Arya Rocky Damanik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 440831 - STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:25

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	28,996,148,000	28,996,148,000	0
2	Belanja	26,441,123,902	26,441,123,902	0
3	Pengembalian Belanja	-4,844,684	-4,844,684	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	15,500,000	15,500,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN
 NO DOKUMEN : 0001/440831/2025
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2025
 TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☒ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	26.887.500	
	K	522141	Beban Sewa		26.887.500

URAIAN PENYESUAIAN

Jurnal Beban di bayar di Muka Sewa Rumah untuk Gudang Penyimpanan BMN

Dibuat oleh:



Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

Disetujui oleh:



Mujtaba Umar Nasution
 NIP.198709222015031001

Direkam oleh :



Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN
 NO DOKUMEN : 0002/440831/2025
 TANGGAL/ PERIODE : 31 Desember 2025
 TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☒ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	8.325.000	
	K	522141	Beban Sewa		8.325.000

URAIAN PENYESUAIAN

Jurnal Beban di bayar di Muka Sewa Gedung Kantor Panipahan Rokan Hilir

Dibuat oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

Disetujui oleh:



Mujtaba Umar Nasution
 NIP.198709222015031001

Direkam oleh :

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
 NO DOKUMEN : 07/440831/2025
 TANGGAL/ PERIODE : 30/06/2025
 TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	Beban Langganan Air	578.450	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		578.450

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Air TBA Desember 2025 dibayarkan Januari 2026

Dibuat oleh:



Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

Disetujui oleh:



Mujtaba Umar Nasution
 NIP. 198709222015031000

Direkam oleh :



Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
NO DOKUMEN : 06/440831/2025
TANGGAL/ PERIODE : 30/06/2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	Beban Langganan Air	15.500	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		15.500

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Air Langsa Desember 2025 dibayarkan Januari 2026

Dibuat oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

Disetujui oleh:



Mujtaba Umar Nasution
NIP. 198709222015031000

Direkam oleh :

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
NO DOKUMEN : 05/440831/2025
TANGGAL/ PERIODE : 30/06/2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	746.500	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		746.500

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Telepon/Internet Idi Desember 2024 dibayarkan Januari 2025

Dibuat oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

Disetujui oleh :



Mujtaba Umar Nasution
NIP.1987092220150310001

Direkam oleh :

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
NO DOKUMEN : 04/440831/2025
TANGGAL/ PERIODE : 30/06/2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	274.750	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		274.750

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Telepon/Internet Meranti Desember 2025 dibayarkan Januari 2026

Dibuat oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

Ditandatangani oleh:



Mujtaba Umar Nasution
NIP.1987092220150310001

Direkam oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
 KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
 NO DOKUMEN : 03/440831/2025
 TANGGAL/ PERIODE : 30/06/2025
 TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	688.250	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		688.250

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Telepon/Internet Rohil Desember 2025 dibayarkan Januari 2026

Dibuat oleh:



Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

Disetujui oleh :



Mujtaba Umar Nasution
 NIP.1987092220150310001

Direkam oleh :



Arya Rocky A Damanik
 NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
NO DOKUMEN : 02/440831/2025
TANGGAL/ PERIODE : 31-Des-25
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	2.969.639	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		2.969.639

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Telepon/Internet Belawan Desember 2025 dibayarkan Januari 2026

Dibuat oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

Disetujui oleh :



Mujtaba Umar Nasution
NIP.198709222015031001

Direkam oleh :

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 032 DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH : 0700 SUMATERA UTARA
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 440831 Stasiun PSDKP Belawan
NO DOKUMEN : 01/440831/2025
TANGGAL/ PERIODE : 31-Des-25
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	8.703.005	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih harus Dibayar		8.703.005

URAIAN PENYESUAIAN

Tagihan Listrik Belawan Desember 2025 dibayarkan Januari 2026

Dibuat oleh:

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001

Disetujui oleh :



Mujtaba Umar Nasution
NIP.198709222015031001

Direkam oleh :

Arya Rocky A Damanik

Arya Rocky A Damanik
NIP.198209212015031001